

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas beberapa hal penting terkait objek penelitian, yaitu: (1). Kondisi demografis yang di dalamnya terdapat kondisi sosial, agama, penduduk, budaya Maluku Utara; (2). Kondisi ekonomi dan lingkungan hidup Maluku Utara; (3). Kondisi politik dan pemerintahan Maluku Utara; (4). Sejarah singkat pembentukan Provinsi Maluku Utara.

A. Peta Provinsi Maluku Utara



B. Kondisi Demografis Maluku Utara

1. Kondisi Sosial

Secara geografis, Maluku Utara adalah daerah kepulauan yang terletak pada lintasan garis khatulistiwa dan berada pada 124° sampai 129° bujur timur dan 3° lintang utara sampai 3° lintang selatan.³³ Daerah dengan penghasilan rempah-rempah ini memiliki luas wilayah 140.255,36 km² yang terdiri dari daratan 33.370,84 km² (23,73%) dan perairan 106.977,32 km² (76,27%).³⁴ Maluku utara dikatakan sebagai daerah kepulauan karena memiliki 353 pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Pulau Halmahera merupakan yang terbesar sekaligus pulau induk, disamping pulau Halmahera sebagai pulau terbesar terdapat pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian yang terletak dibagian barat, sedangkan bagian selatan berdekatan dengan pulau Sulawesi bagian utara terdapat Pulau morotai dan Kepulauan Sula.³⁵ Diantara 353 pulau hanya ada 64 pulau yang berpenghuni sisanya pulau kecil yang tidak berpenghuni.³⁶

Dari pulau-pulau di atas, hanya pulau Ternate dan Tidore yang sangat berpengaruh pada abad ke-16 dan 17 hingga memasuki masa kehancurannya pada abad ke-18. Kedua pulau ini sebagai sentral perekonomian dan perpolitikan di Maluku Utara, oleh karena itu, pada sejarahnya di abad ke-16 dan 17 kedua pulau ini menjadi incaran para pedagang dari Arab, cina, dan lain sebagainya, ada juga negara-negara penakluk seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Berlimpahnya sumber daya alam yang terdapat

³³ _____ M. Adnan Amal, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1800*, Ternate: Universitas Khairun Ternate, 2002, hal. 6.

³⁴ _____ Anonimous, *Maluku Utara Membangun Periode Tahun 2000-2002*, (Ternate: Bappeda Provinsi Maluku Utara), 2003, hal. 9.

³⁵ _____ M. Adnan Amal, *Op, Cit.*, hal. 6.

³⁶ _____ D. _____ belum dihuni umumnya mempunyai radius kurang dari 20 km² dan sebagian

Maluku Utara tidak menjadikan masyarakat hidup makmur karena sangat kental sistem feodal dimana seluruh sumber daya alam dikuasai oleh sultan sebagai raja dan kemudian diperparah dengan masuknya negara imperalisme yang melakukan eksploitasi terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di Maluku Utara.

Pada prosesnya pembentukan sosial di Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh struktur kerajaan. Dalam kerajaan kekuasaan tertinggi di Maluku Utara dijabat oleh Kolano. Kolano kemudian membuat struktur organisasi secara kekeluargaan. Istilah Kolano berubah menjadi Sultan sejak Zainal Abidin (1486-1500) belajar ke Sunan Giri di Jawa. Dari struktur yang dibuat oleh kerajaan kemudian mempengaruhi pembentukan struktur sosial secara umum dalam setiap kelompok etnis berdasarkan garis keturunannya. Adapun pemberlakuan syariat islam oleh Sultan di seluruh wilayah kekuasaannya dengan memerintahkan para kawula untuk berpakaian sopan dan menutup aurat, tidak memakai cawat (cidaku/sabeba). Sedangkan kaum perempuan memakai penutup kepala.³⁷

Adapun Kerajaan Tidore sendiri yang mencapai puncaknya pada era Sultan Nuku. Kaicili Nuku terkenal dengan gerilya lautnya selama 22 tahun lebih melawan belanda. Sebuah pertempuran yang sangat hebat dan berlangsung lama melebihi perang Napoleon di Eropa. Nuku juga kemudian berusaha keras merekonstruksi Kerajaan Jailolo dengan mengangkat Muhammad Arif Billa, Sangaji Tahane, yang menjadi pengikut setianya dalam perang dan sempat masuk ke posisi sebagai Jogugu Kesultanan Tidore, jabatan setingkat perdana menteri. Namun rekonstruksi itu selalu gagal karena selalu mendapat penantangan dari belanda. Nuku bekerja sama dengan inggris dan membuat pakta saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Gambaran singkat tentang sosial-politik para raja-raja di atas setidaknya dapat menjelaskan beberapa aspek pokok khususnya agama bukanlah sesuatu yang prinsip bagi kehidupan para penguasa politik di Ternate dan Tidore bila diperhadapkan dengan situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian sejak dahulu pulau Ternate dan pulau Tidore merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan pembentukan provinsi Maluku. Dari berbagai kerajaan di Maluku yang berkembang saat itu tidak terlepas dari peran Sultan Ternate dan Sultan Tidore, di samping Sultan lainnya.

Kemudian Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi, yang merupakan wilayah dari empat kerajaan islam, yaitu: 1) Kerajaan Ternate, 2) Kerajaan Tidore, 3) Kerajaan Jailolo, dan 4) Kerajaan Bacan. Keempat kerajaan ini merupakan identitas dari Maluku Utara di mana melalui kerajaan-kerajaan ini, pihak luar dapat mengenal Maluku Utara dengan segala bentuk warisan peninggalannya, warisan sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Maluku Utara sebelum menjadi Provinsi, ia hanya sebuah kabupaten dengan nama kabupaten Maluku Utara beribukota Ternate. Kabupaten Maluku Utara kemudian dimekarkan lagi menjadi tiga daerah otonom baru. Daerah otonom ini masing-masing; 1). Kabupaten Maluku Utara (Induk), 2). Kabupaten Halmahera Tengah yang ibukotanya bertampat di Soasio Tidore, dan 3). Kota Administratif Ternate.³⁸ Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Presiden Habibie wilayah Maluku Utara (Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Administratif Ternate) dinaikkan status

kedaerahannya menjadi sebuah Provinsi yakni Provinsi Maluku Utara yang berdasarkan Undang-Undang nomor 46 tahun 1999.³⁹

Provinsi Maluku Utara berdasarkan UU No. 46 tahun 1999 tersebut diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudirja pada tanggal 5 Oktober 1999. Sehingga setiap tanggal 5 Oktober selalu di peringati sebagai hari ulang tahun provinsi. Dengan demikian, status Maluku Utara telah sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara administrasi pemerintahan, Maluku Utara pada tahun 1999 terdiri dari; 1 kotamadya, 2 kabupaten, 27 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan.⁴⁰ Dari ke-27 kecamatan tersebut dari 3 kecamatan di Kotamadya Ternate, 18 kecamatan di Kabupaten Maluku utara dan 6 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Adapun beberapa daerah lain yang cukup strategis dan penting, seperti Tobelo di Halmahera Utara, Maba-Buli di Halmahera Timur, Weda di Halmahera Tengah, Bacan di Halmahera Selatan, dan Sanana di Kepulauan Sula sangat cepat perkembangannya, yang saat ini daerah-daerah tersebut telah dimekarkan menjadi daerah otonom baru.

2. Komposisi Agama

Maluku Utara adalah sebuah provinsi yang sebelum dimekarkan atau dinaikkan statusnya menjadi provinsi adalah sebuah kabupaten yang berada dibawah Pemerintahan Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon. Dalam kehidupan beragama, di Maluku Utara mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, disamping itu juga dapat penganut agama Kristen Katolik, Hindu dan Buhda. Kerukunan umat beragama selalu terjaga sebagaimana tercermin dalam *Adat se atorani Maloko Kie Raha* 'tata adat dan tata

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dibuat pada masa Pemerintahan Presiden Habibie

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960.

aturan daerah empat raja penting di Maluku Utara' yang diperkuat dengan semboyan *Marimoi Ngone Futuru* 'mari bersatu agar kita kuat'.

Komposisi pemeluk agama di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2002 meliputi:

(1) Islam 627.772 jiwa (80.48%) dengan sarana peribadatan berupa masjid 882 buah, langgar 432 buah dan musholla 109 buah, (2) Kristen Protestan 149.360 jiwa (17.50%) dengan sarana peribadatan berupa gereja Protestan 460 buah, (3) Kristen Katolik 8.710 jiwa (1.02%) dengan sarana peribadatan berupa gereja Katolik 29 buah, (4) Buhda 123 jiwa (0.01%) dengan sarana peribadatan berupa pura 1 buah, dan (5) lain-lain 1% (lihat Tabel 2.1).⁴¹

Tabel 2.1:Komposisi Agama Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2002

No.	Agama	Jumlah (%)	Tempat Ibadah
1.	Islam	627.772 jiwa (80.48%)	- Masjid 882 buah - Langgar 432 buah - Musholla 109 buah
2.	Kristen Protestan	149.360 jiwa (17.50%)	Gereja Protestan 460 buah
3.	Kristen Katolik	8.710 jiwa (1.02%)	Gereja Katolik 29 buah
4.	Buhda	123 jiwa (0.01%)	Pura 1 buah
5.	Lain-lain	(1%)	-

Sumber:Data Diolah Dari Pemerintah Maluku Utara Tahun 2002

3. Komposisi Penduduk

Maluku Utara berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 memiliki jumlah penduduk 853.161 jiwa dengan jumlah perempuan (372.597 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki (370.564).⁴² Jumlah itu meliputi: 1) penduduk Kabupaten Maluku Utara sebanyak 545.315 jiwa yang terdiri atas 277.472 laki-laki (50.88%) dan 267.843 perempuan (49.12%); 2) penduduk Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 163.835 jiwa yang terdiri atas 82.323 laki-laki (50.25%) dan 81.512 perempuan (49.75%); 3) penduduk Kota Ternate sebanyak 144.011 jiwa yang terdiri dari 70.769 laki-laki (49.14%) dan 73.242 perempuan atau 50.86% (lihat Tabel 2.2).⁴³

Dari kategori kelompok umur, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara yang berumur 5-9 tahun menempati urutan pertama dengan jumlah 120.903 jiwa. Sedangkan kelompok umur 10-14 tahun berada di urutan kedua dengan jumlah 106.619 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara mencapai 409.211 orang pada tahun 2000 dari jumlah penduduk 816.422 orang. Dari 409.211 orang angkatan kerja tersebut terdapat penganggur terbuka sebanyak 24.232 orang dan setengah penganggur disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 4.802 orang (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2.2: Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2003

⁴² Jumlah penduduk pada waktu itu masih menggunakan statistic dua kabupaten dan satu kota, dengan asumsi bahwa kab/kota hasil pemekaran belum memiliki infrastruktur pemerintahan di daerah yang lengkap seperti belum adanya DPRD kab/kota.

⁴³ Lihat BPS Maluku Utara, *Daftar dan Ternate*; BPS Prov. Maluku Utara, 2003.

No.	Kota/Kabupaten	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1.	Kota Ternate	70.769 (49.14%)	73.242 (50.86%)	144.011
2.	Kab. Maluku Utara	277.472 (50.88%)	267.843 (49.12%)	545.315
3.	Kab. Halmahera Tengah	82.323 (50.25%)	81.512 (49.75%)	163.835
Total Jumlah		370.564	372.597	853.161

Sumber: Data Diolah Dari Pemerintah Maluku Utara Tahun 2003

Tabel 2.3: Pengangguran di Maluku Utara Tahun 2003

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah
1.	Penganggur Terbuka	24.232 orang
2.	Setengah Penganggur	67.677 orang
3.	Penganggur PHK	4.802 orang
Total		95.711 orang

Sumber: Data Diolah Dari Pemerintah Maluku Utara Tahun 2003

Dari komposisi penduduk tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendidikan di Maluku utara. Sebagai gambaran umum, tingkat pendidikan penduduk untuk usia 10 tahun ke atas yang menikmati pendidikan yang tersebar di kabupaten dan kota cukup memprihatinkan. Dari 645.833 jiwa terdapat 475.234 jiwa putus sekolah, dan 21.722 yang belum atau tidak sekolah. Dari data tersebut tingkat daya serap pendidikan di Maluku Utara sangat signifikan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang tergolong dalam kelompok etnis Di Maluku Utara sangat mudah di mobilisasi oleh kelompok elit yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi. Dengan demikian dapat

1) ... 2) pemerintah

harus utamakan penambahan lapangan kerja untuk 97.711 orang penganggur dan setengah penganggur, serta peningkatan mutu pendidikan.

4. Kondisi Budaya

Budaya merupakan bagian dari identitas yang diciptakan oleh sekelompok suku bangsa untuk memperlihatkan eksistensi dan kesatuan suku mereka, hal serupa dapat kita lihat di Maluku Utara dimana terdapat tatacara dari adat istiadat yang merupakan identitas kesatuan tersendiri dari berbagai suku yang ada di Maluku Utara. Secara umum terbagi ke dalam 4 wilayah kultur, yaitu: 1) wilayah kultur Ternate yang meliputi Kepulauan Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula; 2) wilayah kultur Tidore yang mencakup Kepulauan Tidore, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur; 3) wilayah kultur Bacan yang meliputi Kepulauan Bacan, Obi dan Halmahera Selatan serta Makian dan Kayoa; 4) wilayah kultur Jailolo (asal kesultanan Jailolo) meliputi wilayah Halmahera Barat.

Maluku Utara didiami oleh 28 etnis (suku) dengan 29 bahasa, dari jumlah etnis yang ada, terdapat jumlah etnis asli dan dominan seperti etnis Makian yang tersebar di Pulau Makian dan Halmahera (Oba utara sampai Oba Selatan dan Malifut), etnis Tidore yang tersebar di Pulau Tidore, Pulau Maitara dan Halmahera (Oba utara sampai Oba Selatan), etnis Ternate yang tersebar di Pulau Ternate dan Hiri, etnis Sula yang tersebar di Pulau Sanana, Pulau Dofa dan Pulau Mangole, etnis Tobelo-Galela, etnis

... dan etnis lainnya: etnis Medole, Pegu, Gorch dan Toharu

tersebar di Pulau Halmahera.⁴⁴ Sementara ada juga etnis minoritas sebagai etnis pendatang, yaitu: etnis Bugis, Makasar, Buton, Manado, dan Gorontalo yang berasal dari Sulawesi, etnis Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, etnis Madura, Sumatera, Kalimantan, Maluku Tengah, Ambon dan Maluku Tenggara.

Dari 28 etnis yang terbagi ke dalam 35 subetnis (diluar etnis pendatang), terdapat beberapa etnis mayoritas yang dapat dikategorikan sebagai etnis asli (penduduk pribumi), yaitu: 1) etnis Makian yang berjumlah sekitar 21%, 2) etnis Tobelo dan Galela yang berjumlah sekitar 18%, 3) etnis Tidore yang berjumlah sekitar 15%, 4) etnis Ternate yang berjumlah sekitar 14%, 5) etnis Sula (Sanana) yang berjumlah sekitar 12%, 6) etnis Weda, Patani dan Gebe yang berjumlah sekitar 11%.⁴⁵

Hasil data yang diperoleh penulis terkait dengan komposisi etnis menunjukkan etnis Makian sebagai etnis terbesar pertama di Maluku Utara. Sejarah etnis Makian pada awalnya hanya mediami Pulau Makian, namun kemudian sebagian meyebar ke Pulau Kayoa, Pulau Moti, Pulau Kasiruta, Pulau Bacan dan sebelah selatan Pulau Halmahera. Terjadinya letusan Gunung Kiebesi menjadi faktor utama kelompok etnis ini meninggalkan Pulau Makian, dan menyebar ke Pulau-Pulau lain. Disamping gunung berapi, mereka juga merupakan etnis yang sangat masif dalam melakukan sosialisasi dan sangat cepat beradaptasi dengan kelompok etnis lain. Pola penyebaran etnis ini mendominasi selatan wilayah Maluku Utara sehingga lebih terkenal sebagai etnis selatan. Menurut catatan sejak tahun 1950-an mulai menyebar ke selatan Halmahera secara swakarya. Sebagian ke Halmahera Tengah, sedikit mereka ke

⁴⁴ _____ Ibrahim, Gufran Ali., *Kemajemukan yang Berpisah: tantangan Relasi-Interaksi Kemasyarakatan di Maluku Utara*, makalah disampaikan dalam Dialog Dalam Rangka Persiapan Kongres Kebudayaan tahun 2013 oleh BPKKI tahun 2011, Makasar, 16-18 Desember 2011.

⁴⁵ _____, *Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2014*, Biro Pusat Statistik Maluku Utara, Update 31-05-

Halmahera Barat serta dan ke Halmahera Timur. Sekitar tahun 1970-an mereka secara besar-besaran (melalui Program Pemerintah Daerah) ditranslokalkan ke Halmahera Utara, tepatnya di wilayah Kao dan Malifut. Mereka adalah petani ulung, khususnya petani tanaman keras (kelapa, kakao, cengkeh dan kopi).⁴⁶ Dari bidang pendidikan, tingkat pendidikan etnis ini sangat tinggi dan merata, rata-rata lulusan perguruan tinggi dan umumnya berprofesi sebagai guru dan ulama. Etnis ini sangat aktif dan dominative dalam bidang pendidikan dan birokrasi di Maluku Utara.⁴⁷ Dari keseluruhan etnis yang ada di Maluku Utara, secara presentasi etnis ini mendominasi mencapai 21%.

Selanjutnya etnis terbesar kedua adalah etnis Tobelo dan Galela. Etnis ini mendiami wilayah bagian utara Pulau Halmahera, maka lebih terkenal sebagai etnis utara. Komposisi etnis ini persinya mencapai 18% dari keseluruhan etnis yang ada di Maluku Utara.⁴⁸ Pola penyebaran etnis ini juga merata hampir diseluruh kecamatan di Halmahera bagian Utara dan Halmahera bagian Timur, sebagian kecil berlayar ke selatan Halmahera (termasuk di Pulau Bacan). Mata pencarian utamanya adalah pertanian, perkebunan dan berburuh binatang. Kedua etnis ini sangat terkenal dengan nuansa pluralism, karena secara komposisi keagamaan ada yang beragama Islam dan ada yang menganut agama Kristen bahkan dalam satu keluarga ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Kristen. Mereka sangat terbuka dalam menerima etnis pendatang dan mudah bersosialisasi. Namun secara semangat kerja terkenal lemah dan didominasi oleh kalangan Islam.⁴⁹ Tingkat pendidikan etnis ini sedang, dan sebagian

⁴⁶ _____ Ahmad dan Oesman (penyunting.), *Damai Yang Terkoyak*, Ternate: Madani Press. 2000, hal. 87.

⁴⁷ _____ Noerhasim. M, (editor), *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2003, hal. 94.

⁴⁸ _____ *Ibid.*, hal. 95.

⁴⁹ _____ Ahmad dan Oesman., *Op. Cit.*, hal. 91

kecil merupakan lulusan perguruan tinggi. Khusus di Halmahera Utara, etnis Tobelo sangat bersaing dengan etnis Galela dalam hal perebutan kekuasaan di birokrasi dan politik di daerahnya.

Kemudian disusul etnis Tidore sebagai etnis terbesar ketiga. Pola penyebaran etnis ini terbatas pada wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dan sebagian kecil menyebar ke Irian Jaya (Papua dan Papua Barat) dengan populasi sekitar 15% dari total etnis di Maluku Utara. Dari segi ekonomi mereka kebanyakan bergerak di bidang perikanan dan perdagangan, serta sebagian kecil petani.⁵⁰ Etnis ini hanya terkonsentrasi di Pulau Tidore dan Pulau Mare, serta Pulau Maitara karena pada proses mobilisasinya sangat rendah dan tertutup terhadap etnis pendatang, dengan demikian tingkat kepadatannya cukup tinggi. Tingkat pendidikan etnis ini terbilang cukup tinggi dan merata, banyak yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Etnis ini juga menguasai birokrasi dan politik di Maluku Utara.

Etnis terbesar keempat adalah etnis Ternate. Etnis ini berasal dan tinggal di Pulau Ternate, mulai dari pusat kota hingga ke belakang Pulau dan Pulau Hiri, Pulau ini juga sebagai central perdagangan dan pemerintahan di Maluku Utara. Sebagian besar etnis ini melakukan migrasi ke Halmahera Barat (Jailolo, Sahu dan Ibu) Karena secara geografis daerah-daerah tersebut berdekatan dengan Ternate. Etnis ini memiliki mata pencarian di bidang pertanian dan perkebunan serta sebagian kecil sebagai nelayan. Sebagian mereka sebagai pedagang eceran di pasar-pasar tradisional,⁵¹ sebagian sebagai sopir angkot di Kota Ternate. Tingkat pendidikannya masih rata-rata rendah

... dan sebagian kecil yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari segi politik etnis

ini merupakan pengikut setia Sultan Ternate. Presentase etnis Ternate mencapai 14% dari total etnis di Maluku Utara.⁵²

Etnis terbesar kelima adalah etnis Sula (Sanana). Etnis Sula atau yang biasa disebut dengan nama Sanana secara komposisi penyebarannya mendominasi di Kepulauan Sula, Pulau Mangole, Pulau Taliabu, namun ada yang menetap di Pulau Ternate yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan politisi, Sebagian etnis ini lebih memilih berlayar ke Pulau Ambon. Mata pencarian utama mereka adalah sector perikanan, pertanian dan perkebunan. Pola distribusi yang terpusat pada tiga Pulau utama, membuat ikatan kekeluargaan sangat tinggi.⁵³ Tingkat pendidikan etnis ini juga tergolong tinggi serta merata dan umumnya lebih menyukai menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dari segi politik mereka cukup aktif, sehingga mereka mampu bersaing di birokrasi dan perpolitikan di Maluku Utara. Komposisi etnis ini mencapai 12%⁵⁴ dari total etnis di Maluku Utara.

Etnis terbesar keenam adalah etnis Weda, Patani and Gebe. Etnis Weda, Patani dan Gebe menetap di wilayah Halmahera Timur dan Tengah. Etnis ini lebih terkenal dengan etnis tengah, karena mereka menetap di bagian tengah Pulau Halmahera. Jumlah mencapai 11% dari populasi etnis di Maluku Utara. Secara historis etnis ini berasal dari kesultanan Jailolo yang melarikan diri ke Timur Halmahera. Umumnya mereka memiliki mata pencarian berkebun dan bertani. Tingkat pendidikan etnis ini cukup baik dan merata. Pada paruh terakhir, etnis ini mampu menguasai birokrasi dan perpolitikan di daerahnya. Sedangkan komposisi etnis pendatang yang terdiri dari etnis

Buton, Manado, Gorontalo, Batak dan lain-lain berjumlah sekitar 7%. Didominasi oleh etnis Jawa, karena tersebar hampir merata di Pulau Halmahera sebagai transmigran nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Pada umumnya mereka bergerak di bidang pertanian dan perkebunan serta peternakan. Kemudian menyusul etnis Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan yang pada umumnya bergerak sebagai pedagang dan pengusaha di bidang transportasi darat dan laut.

TABEL 2.4: Wilayah Konsentrasi Etnis di Maluku Utara

No	Nama Etnis	Lokasi Konsentrasi Etnis di Kabupaten/Kota	Keterangan (%)
1.	Ternate	Kota Ternate	14
		Kab. Halmahera Barat	
2.	Tidore	Kota Ternate	15
		Kota Tidore	
3.	Makian	Kab. Halmahera Barat	21
		Kab. Halmahera Selatan	
		Kab. Halmahera Utara	
		Kota Ternate	
		Kota Tidore	
4.	Sula	Kab. Kepulauan Sula	12
		Kota Ternate	
5.	Galela dan Tobelo	Kab. Halmahera Utara	18
		Pulau Morotai	
		Kab. Halmahera Selatan	
		Kab. Halmahera Timur	
6.	Patani, Gebe, Weda dan Buli	Kab. Halmahera Tengah	11
		Kab. Halmahera Timur	
7.	Jawa	Kab. Halmahera Timur	2
		Kab. Halmahera Selatan	
		Kab. Halmahera Tengah	
8.	Sumatera	Kota Ternate	1
9.	Sulawesi Selatan, Utara, Tenggara	Kota Ternate	3
		Kab. Kepulauan Sula	
		Halmahera Selatan	
10	Ambon (Maluku)	Kota Ternate	1

		Kab. Kepulauan Sula	
11.	Lain-lain (Arab, Cina dll)	Menyebar di seluruh Kabupaten	2
Jumlah Total			100

Sumber: Data Diolah Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku Utara 2004

Dari keterangan tabel 2.4 diatas, memperlihatkan konsentrasi etnis yang ada di setiap kabupaten/kota di Maluku Utara, konsentrasi etnis yang terdapat disetiap daerah mempermudah pasangan calon dalam melakukan mobilisasi etnis. Hal ini diperlihatkan pada Pilkada Maluku Utara tahun 2007, di mana pasangan calon Gafur (Patani-Weda-Gebe) dan Fabanyo(Tidore) berjanji akan memperjuangkan kepentingan etnisnya yang merasa tersisihkan dari lapangan politik dan ekonomi setelah Armayin terpilih sebagai Gubernur pertama Provinsi Maluku Utara periode 2002-2007. Sebaliknya, Armayin (Makian) dan Kasuba (Galela-Tobelo) juga memanfaatkan kelompok etnis untuk meraih kemenangan pada Pilkada Maluku Utara tahun 2007 dengan mengkampanyekan isu-isu yang bersifat etnisitas untuk memobilisasi massa pemilih yang jelas telah terkonsentrasi di setiap kabupaten/kota di Maluku Utara.

C. Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Maluku Utara

1. Kondisi Ekonomi

Untuk melengkapi penelitian ini, kondisi ekonomi dan lingkungan sangat penting untuk menggambarkan keadaan sosial yang terjadi di Maluku Utara. Faktor ekonomi dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan berperan dalam dinamika politik daerah, karena ketentraman dan ketertiban akan

terjamin apabila didukung dengan kondisi ekonomi dan lingkungan yang baik. Hal ini

menjadi gambaran untuk mengetahui dinamika politik dan perkembangan masyarakat di Maluku Utara.

Perkembangan ekonomi di Maluku Utara sudah diperlihatkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Sejak tahun 1907 perusahaan-perusahaan besar, seperti Moluksche Handel Vonnootschap (MHV), Mulai membuka kantor di Ternate dengan cabang di Halmahera Selatan (Bacan), Kepulauan Sula, Morotai, dan Tobelo. Selain melakukan distribusi bahan kebutuhan pokok, MHV juga membuka usaha di bidang ekspor dammar dan berbagai hasil laut serta hasil hutan lainnya.⁵⁵ Namun dalam perkembangannya dimonopoli oleh pemerintah Belanda yang bekerja sama dengan para tuan tanah, oleh karena itu, pada perkembangannya tidak berjalan baik dengan perkembangan kehidupan masyarakat pribumi.

Setelah Pemerintah Belanda berhasil diusir keluar dari Maluku Utara, perkembangan ekonomi daerah ini semakin membaik namun kemudian sempat mengalami krisis akibat dampak dari kerusuhan sosial beberapa waktu lalu, perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara mulai bangkit kembali pada tahun 2008 pasca kerusuhan sosial. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan sama seperti pertumbuhan di tahun 2008, masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Total kontribusi ketiganya mencapai 72,94%. Tiga Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 3,16%, sektor jasa-jasa 3,14%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 3,11 persen. sementara untuk

⁵⁵ _____ Syahril Muhammad, *KESULTANAN TERNATE: Sejarah Sosial, Ekonomi dan Politik*, Yogyakarta: Ombak, 2004, hal. 140

pertumbuhan, tertinggi pertama di sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 12,06%, kedua sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 9,74%, dan ketiga sektor industri pengolahan 7,95%.⁵⁶

Komoditi unggulan Provinsi Maluku Utara terdapat disektor pertanian dan sektor jasa. Komoditi yang diunggulkan yaitu sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi seperti cengkeh, kelapa, pala, kakao dan gula aren. Adapula komoditi penunjang pada sektor pertanian seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar dan kacang tanah. Sedangkan dari sektor perikanan ada hasil tangkapan seperti ikan tuna, tongkol, cakalang, kakap, teri. Sementara dari sektor jasa yang diunggulkan adalah bidang pariwisata.

Provinsi Maluku Utara juga memiliki fasilitas transportasi sebagai sarana mobilisasi perekonomian seperti transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi darat, ada angkutan darat yang beroperasi melayani kebutuhan pengangkutan orang dan barang baik antar wilayah maupun antar pulau yang terdiri dari armada bus sebanyak 13 unit, mobil penumpang umum 1.747 unit, truk 370 unit dan angkutan penyeberangan sebanyak 5 unit. Jumlah terminal yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak 14 buah tersebar di Pulau Ternate sebanyak 3 buah, dan lebih dari 10 buah untuk kawasan Pulau Halmahera. Untuk mendukung mobilisasi perekonomian di Maluku Utara jaringan jalan yang menjadi prioritas dibangun di Pulau Halmahera karena kawasan ini menjadi kawasan pengembangan ekonomi di Maluku Utara, adapula jaringan jalan yang dibangun adalah jalan trans Halmahera yang menghubungkan Kota Sofifi – Akelamo, Payahe – Weda, Weda – Mafa, Maba - Sagea - Kobe, Sidangoli – Dodinga, Nusajaya – Subaim.

Untuk sarana transportasi udara, terdapat 10 buah pelabuhan udara yang terdiri dari pelabuhan kelas tiga sebanyak 1 buah terletak di Ternate, pelabuhan kelas empat sebanyak 2 buah, kelas lima sebanyak 3 buah dan kelas perintis sebanyak 5 buah. Sedangkan transportasi udara regular dilayani di Bandara Babullah Ternate – Manado – Makasar – Surabaya – Jakarta. Bandara babullah merupakan pintu gerbang dari dan ke Provinsi Maluku Utara, Bandara Babullah merupakan penunjang percepatan mobilitas ekonomi antar provinsi. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan penerbangan dari dan ke Provinsi Maluku Utara yang semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan tertinggi pada penerbangan tujuan ke Manado, Makasar dan Jakarta yaitu rata-rata 37 perminggu, disusul Ambon dengan 6 kali perminggu dan sorong 2 kali perminggu.

Untuk sarana transportasi laut yang beroperasi di Kepulauan Maluku Utara terdiri dari kapal PELNI, kapal Nusantra, Perintis dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan. Kapal-kapal PELNI hanya melayani pelayaran antar provinsi, sedangkan pelayaran antar kabupaten/kota dan antar pulau dilayani oleh kapal-kapal Pelra.

2. Kondisi Lingkungan Hidup

Maluku Utara memiliki rencana pola ruang wilayah, seperti yang diketahui ruang wilayah terdapat 1. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, 2. Hutan Lindung, 3. Hutan Produksi Terbatas, 4. Hutan Produksi, 5. Daerah Pertanian, 6. Daerah Permukiman, 7. Daerah Perkebunan. Sedangkan pada kawasan budidaya di Provinsi Maluku Utara

1. Hutan Lindung, 2. Hutan Wisata, 3. Hutan Suaka Alam, 4. Hutan Produksi Terbatas, 5. Hutan Produksi, 6. Daerah Pertanian, 7. Daerah Permukiman, 8. Daerah Perkebunan

hutan produksi tetap, 3. hutan produksi terbatas. Kawasan ini memiliki nilai strategis provinsi ditetapkan sebagai kawasan andalan. Nilai kawasan ini dan kawasan lainnya yang memiliki kemampuan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemerataan perkembangan wilayah dan ditetapkan sebagai kawasan andalan provinsi.

Kawasan yang mempunyai nilai strategis tersebut terdapat disetiap kabupaten/kota di Maluku Utara, tapi karena adanya sentimen etnis yang terjadi di Maluku Utara yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah. Persoalan ini yang menyebabkan masih banyaknya kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis belum sepenuhnya dikelola secara baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibutuhkan keseriusan dan kemampuan dari pemerintah dalam proses pengolahan kawasan strategis tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitar serta mendorong pemerataan perkembangannya.

D. Kondisi Politik dan Pemerintahn

Maluku Utara telah mengenal struktur kekuasaan politik sejak 1255 melalui Perjanjian Foramadiah. Terbentuknya pola pemerintahan kesultanan Ternate melalui perjanjian tersebut yang berlandaskan tradisi lokal dan Islam, dimana struktur pemerintahan yang memperlihatkan berjalannya mekanisme pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pelapisan sosial yang mengisinya, ada empat kelompok sosial yang kemudian menciptakan suatu struktur sosial dengan aturan-aturannya antara lain aturan politik, aturan kemiliteran, aturan kekuasaan, dan aturan perekonomian, keempat

aturan-aturan pemerintahan di Maluku Utara yaitu; Tubo, Tobona, Tabanga, dan Toboleu,⁵⁷ yang kemudian disebut sebagai empat soa.

Dalam menjalankan pemerintahan, sultan menduduki lapisan teratas dibantu oleh tiga pejabat tinggi, yaitu *jogugu* (semacam menteri utama), *kapitan laut* (yang memimpin armada kerajaan atau *hong*), dan *hukom* atau *apprrechter* yang disamakan dengan hakim tinggi.⁵⁸ Sultan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi pada proses pengendalian kekuasaan dalam pemerintahan pada masa kejayaannya, namun kemudian kedudukan itu hilang secara perlahan-lahan setelah Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi. Kedudukan sultan dan pihak keraton telah diambil alih oleh gubernur dengan lembaga-lembaga pemerintahan Negara.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sebelumnya telah ada dinamika politik dan pemerintahan di Maluku Utara dengan peristiwa-peristiwa yang menempatkan Ternate sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di bagian Timur Indonesia. Pada tanggal 27 April 1999 Ternate mengalami peningkatan status dari kota administratif menjadi kotamadya.⁵⁹ Peningkatan status ini berdasarkan atas pertimbangan aspek sosial kemasyarakatan dan aspek perkembangan ekonomi.

Setelah Ternate mengalami peningkatan status dari tahun 1999 hingga tahun 2003 infrastruktur pemerintahan di Maluku Utara belum memadai. Disamping aparatur pemerintahan yang sangat lemah, pada waktu itu juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun belum dibentuk. DPRD baru dibentuk pada tahun 2003, mulailah DPRD bersama pihak eksekutif memulai tugasnya menyusun rencana pembangunan dan

⁵⁷ ——— Muhammad, *Op., Cit*, hal. 52

⁵⁸ ——— Muhammad, *Op., Cit*, hal. 53

⁵⁹ ——— DPRD, *Kita Ternate*, Diklat, 4, hal. 25

lambang provinsi. Kemudian mulailah roda pemerintahan Maluku Utara dijalankan oleh para birokrat yang bertugas di Kabupaten Maluku Utara dan di Kota Ternate.

Pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif daerah bersama DPRD telah menyusun visi dan misi pembangunan setelah terjadinya konflik sosial yang dituangkan dalam pola dasar pembangunan. Adapun visi dan misi pembangunan Maluku Utara sebagaimana ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2003-2007 adalah terwujudnya Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan Dalam lingkungan masyarakat yang religius, berbudaya, mandiri, damai, maju, adil, dan sejahtera berbasis sumber daya tahun 2023.⁶⁰

Demi terwujudnya visi pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah 9 misi, yaitu:

- 1) mendorong terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang menghargai keberagaman;
- 2) mendukung terciptanya wawasan kebangsaan dan sistem keamanan yang tangguh;
- 3) mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang agamis, demokratis, berkualitas serta menguasai IPTEK;
- 4) mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sehat, dinamis dan berdaya tahan dari pengaruh globalisasi;
- 5) mendorong terwujudnya sistem dan kesadaran hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM;
- 6) mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 7) memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- 8) meningkatkan dan mengembangkan

infrastruktur wilayah yang berkelanjutan; 9) mengembangkan potensi sumber daya alam secara optimal.⁶¹

Kemenangan pasangan Armayin-Kasuba atas Gafur-Fabanyo pada Pilkada Maluku Utara tahun 2007 tidak terlepas dari kerja anggota DPRD dalam ikut memenangkan pasangan tersebut, dilihat dari persentase keanggotaan DPRD provinsi Maluku utara berdasarkan etnis (lihat tabel 2.5) didominasi oleh etnis makian. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak terbuka anggota DPRD juga ikut bekerja memobilisasi massa pemilih berdasarkan etnis untuk memenangkan pasangan calon yang mempunyai kesamaan etnis dengan mereka. Sedangkan jika dilihat berdasarkan perolehan kursi DPRD Maluku Utara (lihat tabel 2.6) dimenangkan oleh partai pengusung pasangan calon Gafur-Fabanyo yaitu partai P. Golkar, penjelasan ini menegaskan bahwa etnis masih sangat berperan dalam memenangkan pasangan calon pada Pilkada Maluku Utara tahun 2007.

Tabel 2.5

Persentasi Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Etnis

No.	Etnis	Jumlah	Presentase	Pembulatan (%)
1	Makian	9	25.714.286	25.7
2	Tidore	6	17.142.857	17.1
3	Ternate	6	17.142.857	17.1
4	Galela-Tobelo	5	1.428.571	14.3
5	Weda-Patani	1	2.857.143	2.9
6	Lain-lain(Arab, Jawa dll.	6	17.142.857	17.1

Tabel 2.6: Perolehan Kursi DPRD Maluku Utara

No.	Partai	Kursi	Suara	Persentase (%)
1	P. Golkar	9	96067	22.3
2	PDIP	5	45668	10.6
3	PKS	4	37627	8.7
4	PDS	3	37648	8.7
5	PPP	3	28129	6.5
6	PAN	3	25308	5.9
7	P. Demokrat	3	23656	5.5
8	PDK	2	30686	7.1
9	PBR	2	17447	4.1
10	PBB	1	19272	4.5

Sumber: Data Diolah Dari KPUD Maluku Utara tahun 2004